

PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH DALAM ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT (Studi pada Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Buton)

Anwar Sadat
Universitas Muhammadiyah Buton

Abstrak

Pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based society) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (demanding community). Osborne dan Gaebler (1992) dengan karyanya yang monumental melahirkan konsepnya "Reinventing Government" yang telah menawarkan bentuk dan cara pengelolaan sektor publik dengan mengadopsi prinsip, semangat dan spirit entrepreneurial (kewirausahaan). Penerapan konsep ini membutuhkan arah yang jelas dan political will yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton dalam menerima dan memahami konsep kewirausahaan dan untuk memahami faktor-faktor yang menjelaskan pemahaman dan sikap pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton dalam menerima konsep kewirausahaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber data dan populasinya adalah seluruh pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan menggunakan stratified random sampling.

Dari hasil analisis dan interpretasi ditemukan bahwa pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemerintah Kabupaten Buton terhadap konsep kewirausahaan secara umum dapat dikatakan masih rendah. Ini tergambar dari banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada didalam kewirausahaan seperti customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola kemitraan dengan swasta dan adanya orientasi profit oriented bagi pemerintah. Hal ini disebabkan masih jaranganya konsep ini diperkenalkan (kurangnya sosialisasi) kedalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton, kurangnya kompetensi dan adanya budaya birokrasi paternalistik yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya konsep ini kedalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton.

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemda Kabupaten Buton terhadap konsep kewirausahaan maka disarankan Pemda Kabupaten Buton untuk lebih giat mensosialisasikan dan mengenalkan konsep ini pada pejabat-pejabatnya. Sehingga didapatkan pemahaman dan pengetahuan yang holistik. Selanjutnya mengkasur budaya paternalistik kepada budaya yang menghargai inovasi, kreatifitas dan etos kerja dengan mengubah nilai, simbol dan sistem insentif yang ada dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton. Selain itu, yang terpenting adalah adanya perubahan pola pikir dan mentalitas baru ditubuh birokrasi pemerintah itu sendiri karena sebaik apapun konsep yang ditawarkan jika semangat dan mentalitas penyelenggara pemerintahan masih menggunakan paradigma lama, konsep tersebut hanya akan menjadi slogan kosong tanpa membawa perubahan apa-apa yang berarti.

Kata Kunci: Birokrasi, Kewirausahaan

I. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa dengan jatuhnya rejim Soeharto bertujuan untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi diharapkan menjadi jalan bagi penyelesaian per-

masalahan bangsa yang dihadapi dan menjadi harapan bagi masyarakat sebagai momentum untuk menemukan cara baru dalam mendesain jalannya roda pemerintahan, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Gerakan Re-

formasi menuntut adanya perubahan struktur, kultur dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan terutama birokrasinya. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi pemerintahan mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang terjadi selama ini.

Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin mengedepan dalam era reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan setidaknya meliputi beberapa hal: pertama, reformasi sistem politik yang merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinafikan untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam proses politik yang menyangkut kepentingan publik (Gaffar, 2000, 145-173); kedua, reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pola sentralisasi yang bersifat paternalistik menjadi desentralisasi yang bersifat kemitraan (Rasyid, 2001, 200); ketiga, tuntutan untuk mewujudkan *good governance and clean government* dalam penyelenggaraan negara yang didukung dengan prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme dan demokratis seperti yang dikumandangkan oleh World Bank, UNDP, United Nation dan beberapa lembaga internasional lainnya (Edralin, 1997:25).

Pemerintah Kabupaten Buton sudah saatnya untuk mereposisi perannya kembali menjadi birokrasi publik yang memiliki akuntabilitas, responsif, inovatif dan profesional serta berjiwa entrepreneur. Birokrasi daerah harus semakin kreatif dalam mengemban fungsi pemerintahan modern yakni, 'pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat' (Rasyid, 1997, 48). Pola-pola lama dalam kultur birokrasi, kepemimpinan, struktur kelembagaan, manajemen sumber daya manusia dan sebagainya harus diorientasikan kearah pembentukan birokrasi publik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat dan mengglobal.

Pendekatan NPM ini bila ditarik benang merahnya (Hughes, 1994, :216) menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance* dan Kewirausahaan

dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Governance* dan Kewirausahaan itu sendiri. Mencermati banyaknya ide, konsep, pendekatan dan paradigma baru tentang reformasi birokrasi maupun penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan yang telah dikemukakan para ahli, tetapi sangat jarang diikuti dengan kajian kritis mengenai perilaku, sikap dan persepsi elit birokrasi yang melaksanakan reformasi tersebut. Memang diakui telah terjadi perkembangan diskursus (wacana) mengenai *Good Governance* dan Kewirausahaan dan menjadi perdebatan oleh banyak kalangan, baik para politisi, kalangan akademisi, praktisi pemerintahan maupun masyarakat dengan persepsi dan argumen yang berbeda-beda. Seharusnya elit birokrasi menyikapinya dengan kritis dan konstruktif serta mengadakan reformasi terlebih dahulu terhadap perilaku, mind set maupun budaya serta kompetensi yang harus dimilikinya dalam merespon tuntutan dan dinamika perubahan tersebut.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai persepsi pejabat birokrasi pemerintahan dalam memahami ide Kewirausahaan, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah persepsi pejabat birokrasi Kabupaten Buton terhadap ide kewirausahaan"?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan perspektif pejabat birokrasi pemerintahan Kabupaten Buton dalam menerima dan memahami ide kewirausahaan.

Adapun Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pemerintah Kabupaten Buton dalam menerima dan memahami ide kewirausahaan

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan penerapan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu semangat kewirausahaan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tidak ada penegasan yang jelas tentang pendekatan yang akan digunakan, baik pendekatan positivistik maupun pendekatan naturalistik, tetapi mencoba untuk mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada yakni keadaan menurut gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi Arikunto, 1996:309).

Penelitian ini dimaksudkan berupaya memahami, menggambarkan dan melukiskan persepsi dari pejabat struktural pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam menerima dan memahami ide *entrepreneurial government* serta mengetahui faktor-faktor yang menjelaskan persepsi pejabat tersebut terhadap ide *entrepreneurial government*.

Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas (variabel independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas adalah Kewirausahaan. Sedangkan variabel terikat adalah Persepsi Pejabat Birokrasi. Secara skematis model analisis yang akan dilakukan dalam mengkaji *entrepreneurial government* dalam persepsi pejabat birokrasi dan faktor-faktor yang menjelaskannya adalah sebagai berikut:



Definisi Konsep

Definisi konsep dari masing-masing variable adalah sebagai berikut

1) *Entrepreneurial Government* adalah suatu birokrasi pemerintahan yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dengan karakteristik berorientasi pada kebutuhan masyarakat (customer oriented), efisien, inovatif, responsive dan kompetitif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2) Persepsi pejabat birokrasi adalah pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemda kabupaten terhadap ide dan konsep dari *Entrepreneurial Government*.

3) Kompetensi pejabat adalah kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

4) Sosialisasi adalah proses belajar untuk mengetahui dan mengenal sesuatu yang terefleksi kedalam persepsi, sikap dan tingkah laku seseorang.

5) Budaya birokrasi adalah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, dan pengetahuan yang diaktualisasikan kedalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap pejabat.

Definisi Operasional

Entrepreneurial Government

1) Variabel *entrepreneurial government* dapat diukur dengan menggunakan indikator.

- Berorientasi pada masyarakat (customer oriented)
- Efisiensi dalam penggunaan anggaran
- Inovasi dan kreatifitas
- Kompetitif dalam penyelenggaraan pelayanan public

2) Persepsi pejabat birokrasi adalah pemahaman, pengetahuan dan penerimaannya terhadap ide dan konsep dari *entrepreneurial government* oleh pejabat birokrasi. Persepsi pejabat birokrasi akan diukur dari:

- Pemahaman dari pejabat pemda terhadap konsep *entrepreneurial government*
- Dilihat dari keikutsertaan pejabat pemda dalam pelatihan dan kursus yang berhubungan dengan penerapan kewirausahaan sektor publik
- Tingkat penerimaan terhadap konsep *entrepreneurial government* dalam diri para

pejabat penda

d) Tingkat penolakan terhadap konsep *entrepreneurial government* dalam diri pejabat

3) Kompetensi pejabat adalah kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kompetensi pejabat akan diukur dari:

a) Tingkat kecakapan dan ketrampilan pejabat dalam bekerja dan menyelesaikan masalah yang ada.

b) Kemampuan pejabat penda dalam melakukan kerjasama antar unit, bagian dan dinas atau instansi dalam pelaksanaan tugas.

c) Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan.

d) Tingkat kreatifitas dan inovasi yang ditunjukkan pejabat penda dalam melaksanakan tugas

4) Sosialisasi adalah proses belajar untuk mengetahui dan mengenal sesuatu yang terrefleksi kedalam persepsi, sikap dan tingkah laku seseorang.

Sosialisasi akan diukur dari:

a) Intensitas diklat, seminar dan workshop yang diikuti oleh pejabat penda yang berhubungan dengan penerapan konsep *entrepreneurial government*

b) Banyaknya waktu yang digunakan dalam mengenalkan konsep *entrepreneurial government* pada pejabat penda

c) Ada tidaknya kegiatan untuk mengenalkan konsep *entrepreneurial government* yang dilakukan oleh penda

5) Budaya Birokrasi adalah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki, simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran, seperangkat nilai yang diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap pejabat.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya, yaitu:

Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat struktural eselon II, III, dan eselon IV serta melalui teknik wawancara sebagai *cross check data*.

Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, melainkan data yang telah diolah seperti tabel, laporan penelitian, dokumentasi serta data lain yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Singarimbun (1995:152) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Buton sejumlah 136 buah jabatan struktural dengan komposisi sebagai berikut:

Eselon II : 15 orang

Eselon III : 54 orang

Eselon IV : 67 orang

Jumlah : 136 orang

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 68 orang. Untuk menentukan sampel tersebut penulis menggunakan teknik stratified random sampling (Singarimbun dan Effendi, 1995, 162-165) Sampel tersebut terdiri dari:

$$\text{Eselon II} : \frac{15}{136} \times 68 = 7$$

$$\text{Eselon III} : \frac{54}{136} \times 68 = 27$$

$$\text{Eselon IV} : \frac{67}{136} \times 68 = 34$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

a) Kuesioner (angket)

b) Teknik Wawancara.

c) Teknik Observasi.

d) Teknik Dokumentasi

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Data yang ada kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi dan persentase untuk masing-masing aspek penilaian beserta indikator pengukurannya dan dilakukan analisis persentase. Kemudian metode kualitatif digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap data yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian tentang persepsi pejabat birokrasi di Kabupaten Buton dalam Kewirausahaan. Sebelumnya akan dibahas pula karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Deskripsi Responden. Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) kuesioner dan jumlah ini dianggap sudah mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Tabel IV.1. Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Kelompok Jabatan	Yang disebar
1	Eselon II	7
2	Eselon III	27
3	Eselon IV	34
	Jumlah	68

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Kuesioner sejumlah 68 tersebut kemudian diidentifikasi karakteristiknya yang dilihat melalui jenis kelamin, usia dan pendidikan responden yang disajikan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel IV.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	48	70,58
Perempuan	20	29,42
Jumlah	68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Dari data pada tabel IV.2 terlihat bahwa mayoritas pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton adalah laki-laki sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang (70,58%) dan perempuan sebanyak 20 (dua puluh) orang (29,42%).

Tabel IV.3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	22 s/d 31 Th	9	13,3
2	32 s/d 41 Th	33	48,5
3	42 s/d 51 Th	25	36,7
4	≥52 Th	1	1,5
	Jumlah	68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas pejabat struktural dilingkungan

pemerintah Kabupaten Buton berusia diantara 42 s/d 51 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang (13,3%), disusul usia antara 32 s/d 41 tahun sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang (48,5%), kelompok ketiga berada diantara usia 22 s/d 31 tahun sebanyak 25 (dua puluh lima) orang (36,7%) dan kelompok terakhir berada diantara usia ≥ 52 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pejabat struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton mereka yang mempunyai usia diantara 32 s/d 41 tahun.

Tabel IV.4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMU/SMK	8	11,7
2	Diploma	7	10,3
3	Sarjana	32	47,1
4	Pasca Sarjana	21	30,9
	Jumlah	68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.4 terlihat bahwa kebanyakan pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton berpendidikan sarjana (S.1) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang (47,1%), kelompok kedua berpendidikan diploma sebanyak 7 (tujuh) orang (10,3%), disusul yang berpendidikan pasca sarjana (S.2) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang (30,9%) dan kelompok terakhir berpendidikan SMU/SMK sebanyak 8 (delapan) orang (11,7%).

Berdasarkan hasil deskripsi tersebut dapat dikatakan bahwa karakteristik individu atau responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini otomatis dapat mempengaruhi persepsinya terhadap penerapan konsep *entrepreneurial government*. Seperti dikatakan dalam landasan teori bahwa faktor personal yang melekat dalam diri individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, kepangkatan dan jabatan dalam pekerjaan yang diwujudkan dalam karakteristik individual seperti minat, motivasi dan kepentingan serta pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi pejabat struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton dalam mempersepsikan sebuah objek. Pejabat struktural yang menjadi sampel dalam penelitian ini berasal dari berbagai eselon yang berbeda, dengan sendirinya minat, tujuan dan motivasi mereka pun berbeda. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan persepsi diantara masing-masing eselon tersebut terhadap penerapan konsep Kewira-

sahaan.

Setelah digambarkan mengenai karakteristik dari ke 68 (enam puluh delapan) responden terpilih yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan hasil penilaian, persepsi responden terhadap penerapan konsep Kewirausahaan yang selama ini dipahaminya serta persepsi responden tersebut yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase dari hasil jawaban responden.

Persepsi Pejabat Terhadap Kewirausahaan Aspek *Costumer Oriented*

Tabel IV.5 Aspek *Costumer Oriented* dalam
Entrepreneurial Government

No	Isi Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Adanya Citizen carter dalam pelayanan publik	13	19,2
2	Mengembangkan program <i>customer choice</i> dalam pelayanan publik	18	26,4
3	Pemerintah tidak melakukan semua kegiatan pelayanan publiknya	15	22,1
4	Pemerintah melakukan pemberdayaan pada masyarakat	22	32,3
	Jumlah	68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.5 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek *costumer oriented* untuk item pernyataan adanya *citizen carter* dalam pelayanan publik sebanyak 13 orang (19,2%) menyatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dikembangkannya *citizen carter* dalam pelayanan publik dan hanya sebagian kecil yang setuju untuk dikembangkannya *citizen carter* tersebut.

Berikut ini wawancara penulis dengan pejabat eselon IV, Ibu Syaraswati selaku Kasubag Rumah Tangga di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton:

"Kalaulah *citizen carter* itu dibuat dan dilaksanakan masyarakat kita belum siap, bisa-bisa mereka akan berdemo terus ke kantor supaya urusan mereka bisa cepat selesai. Dan saya juga melihat pegawai kita disini banyak yang tidak mengerti dan juga tidak siap dengan adanya perubahan serta perlu diadakannya sosialisasi jauh-jauh hari. Kemudian lagi, takutnya itu hanya slogan-slogan kosong yang memperparah pelayanan pada masyarakat, ya hanya lip servislah." (Hasil wawancara 26 Agustus 2013)

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa masih ada keragu-raguan dan ketidakmengertian dari pegawai tentang *citizen carter* itu sesungguhnya. Selain itu mereka masih menganggap masyarakat belum siap dan tidak dewasa dalam menyikapi perubahan dalam hal pelayanan publik. Kejelasan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia jasa yang terdapat dalam sebuah *citizen carter* menyebabkan banyak orang ragu untuk mengaplikasikan konsep tersebut karena ada konsekuensi didalamnya.

Untuk item pernyataan mengembangkan program *customer choice* atau pilihan pelanggan dalam bidang pelayanan, 18 orang (24,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak setuju bila dikembangkan program *customer choice* atau pilihan pelanggan dalam bidang pelayanan seperti memperbanyak providers (penyedia jasa), memberikan informasi ataupun dengan *quality assurance* (standar pelayanan minimal).

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan pejabat eselon IV di Bappeda Kabid Statistik dan Evapor bapak Drs. L.M. Takdir, M.Si sebagai refleksi dari kesimpulan diatas:

"Wah, saya tak paham betul mengenai program *customer choice* ini karena saya bekerja tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kalau boleh saya berpendapat, masa reformasi yang penuh dengan kebebasan ini membuat masyarakat menjadi kuat tetapi kuatnya masyarakat bukan malah bagus malah tambah kacau dan banyak demo-demo disana sini, kejahatanpun meningkat. Nah, kalau masyarakat diberikan lagi kebebasan dalam hal pelayanan itu akan membuat mereka semakin manja dan pemerintah akan semakin kualahan. Jadi menurut saya kita pemerintah dan masyarakat itu sendiri belum siap untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi mengadakan sebuah perubahan, susahlah banyak makan korban belum lagi yang *pro status quo*." (27 Agustus 2013)

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa pejabat pemda banyak yang belum mengerti dan memahami tentang adanya program pilihan pelanggan (masyarakat)

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. *Customer choice* atau pilihan pelanggan memberikan kemudahan pada pengguna jasa dalam memilih penyedia jasa sesuai dengan karakteristik aspirasi yang dimilikinya. Untuk itulah pemerintah harus mendorong sebanyak mungkin munculnya *providers* (penyedia jasa), membangun insentif dan memperbanyak fasilitas khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan serta mempermudah *market entry* bagi masyarakat luas.

Selanjutnya pemerintah memberikan informasi mengenai masing-masing *providers* pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanannya, biayanya, kualitas layanannya dan waktunya sehingga tidak terjadi gap informasi dan masyarakat mengetahui serta bisa memilih *providers* yang cocok dengan kondisinya. Ungkapan dari Kepala Bagian Keuangan I.M. Davis, SE berikut setidaknya tidaknya merefleksikan persepsi tersebut :

"Oh iya itu ide bagus yang dikontarkan oleh Osborne dalam bukunya, saya pun membayangkan waktu saya mendapatkannya diperkuliahan, kalau ide itu bisa diterapkan dalam pelayanan publik tentu saja sedikit banyaknya akan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Banyak keuntungan yang kita dapat kalau kita bisa melakukannya pertama masyarakat bebas memilih penyedia jasanya, kompetisi antar *providers* terjadi sehingga masyarakat diuntungkan sebab *providers* yang mahal dan kualitas pelayanannya jelek akan ditinggalkan masyarakat, selanjutnya masyarakat tahu informasi tentang *providers* dan *product* yang dihasilkannya. Saya sependapat bila itu perlu dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan." (Hasil wawancara 28 Agustus 2013)

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah sebaiknya tidak melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik menunjukkan 15 orang (22,1%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian masih menginginkan pemerintahlah yang harus melakukan semua pelayanan kepada publik. Pandangan seorang pejabat eselon IV Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab di Sekretariat Daerah Bapak La Maso, S.Sos, setidaknya tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

"Kalau pemerintah tidak melakukan pelayanan publik, jadi siapa yang melakukannya? Swasta, yang bener ajalah, masak swasta yang melakukannya, itu bahaya besar karena jelas-jelas swasta misinya mencari keuntungan, bisa dijual semua nanti, kan yang berat masyarakat juga jadinya, lihatlah telkom seenaknya saja naikkan tarif dengan seribu alasan padahal mereka sudah untung saham mereka dipasar modal lihatlah naik terus, tengok lagi bank-bank swasta yang kolaps kan pemerintah juga yang sibuk itu artinya rakyat juga yang menanggung beban, swasta di Indonesia parah-parah semua tidak sama mungkin diluar negeri yang sudah bagus. Untuk saat sekarang pemerintahlah yang harus melakukannya." (Hasil wawancara 28 Agustus 2013).

Keterlibatan pihak swasta dan NGO dalam melakukan pelayanan publik dalam rangka efektivitas dan efisiensinya sebuah pelayanan. Ketika pelayanan itu lebih baik dilakukan oleh pihak swasta atau NGO maka itu harus dilepas oleh pemerintah dan begitu juga sebaliknya. Dalam *good governance* ada tiga unsur yang menopang jalannya sebuah *governance* selain pemerintah ada pihak swasta dan *civil society*. Ketiga komponen inilah yang harus disinergikan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Pembagian peran antar ketiga komponen ini dimungkinkan selama bermuara pada kepentingan publik secara luas. Begitu juga dalam hal pelayanan publik merupakan tanggungjawab ketiga komponen ini untuk melakukannya. Pemerintah hanya berfungsi ketika terjadi kegagalan pasar maupun kegagalan *civil society*.

Ungkapan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Setdakab Bapak La Kabona, S.Sos berikut dapat merefleksikan pemahaman tentang masalah tersebut.

"Betul, sekarang zamannya sudah berubah, kalau pada masa awal-awal merdeka ataupun awal orde baru pemerintahlah yang menangani semua urusan masyarakat sampai kehal-hal yang tetek bengek (hal-hal kecil), tapi sekarang dengan pembangunan selama ini masyarakat semakin pintar dan ingin ikut ambil bagian dalam urusan-urusan publik, tak ketinggalan pihak swasta, ditambah lagi

beban pemerintah semakin berat kalau semua urusan ditanganinya sendiri. Kitakan merasakan hampir semua urusan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sangat mengecewakan dan memprihatinkan, pokoknya asal jadi saja. Disinilah saya rasa perlunya pihak lain yang menyediakan jasa pelayanan. Memang masalahnya sangat kompleks dan perlu perubahan yang mendasar” (Hasil wawancara 28 Agustus 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan pemerintah perlu melakukan pemberdayaan pada masyarakat terdapat 22 orang (32,3%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila pemerintah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Dari hasil observasi dilapangan, banyaknya responden yang setuju dengan ide pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Berikut hasil wawancara dengan Bapak L.M. Jafar, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton :

“Pemberdayaan merupakan tugas pokok dari pemerintah modern saat ini di samping tugas-tugas lain seperti pelayanan dan regulasi, agar masyarakat bisa mandiri dan ketergantungan pada pemerintah dapat dikurangi. Saya juga melihat kalau masyarakat kita perlu untuk diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan agar ia bisa mandiri serta punya semangat untuk berusaha. Kan kebanyakan masyarakat kita tidak kreatif dan inovatif apalagi masyarakat di daerah kita yang banyak menjadi penonton dari pemain” (Hasil wawancara 28 Agustus 2013).

Masalah pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu misi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikemukakan oleh L.M. Jafar, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dibawah ini :

“Program pemberdayaan masyarakat telah menjadi misi utama kabupaten, kita pemerintah daerah terus mendorong kearah sana apalagi kitapun telah membentuk dinas pemberdayaan masyarakat desa. Sasarannya sangat jelas bahwa masyarakat kita yang di desa sangat tertinggal dan perlu diberdayakan. Banyak program-program dan

pelatihan-pelatihan yang telah kita lakukan untuk masyarakat dalam rangka pemberdayaan” (Hasil wawancara 28 Agustus 2013).

Aspek Efisiensi Anggaran
Tabel IV.6. Aspek Efisiensi Anggaran dalam Entrepreneurial Government

No	Item Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Penyusunan anggaran pemerintah yang didasarkan pada kinerja begitu penting dan mendesak ditekankan	21	30,8
2	Pengukuran kinerja dilakukan untuk efisiensi anggaran dan memonitori KKN	19	27,9
3	Pemberian insentif anggaran pada instansi nunda berdasarkan kinerjanya	16	23,6
4	Anggaran yang didasarkan pada kinerja lebih mempunyai pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi	12	17,7
Jumlah		68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Selanjutnya berdasarkan data pada tabel IV.6 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek efisiensi anggaran untuk item pernyataan bahwa penyusunan anggaran pemerintah yang didasarkan pada kinerja begitu penting dan mendesak untuk diterapkan, sebanyak 21 orang (30,8%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden setuju untuk diterapkannya penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

Hal tersebut seperti dikatakan oleh WD. Sitti Nurmahara, SF. Selaku Kasubag Perindag, PMD dan PMA di bagian perekonomian Setdakab Buton,

“Kita dikabupaten ini kurang mengerti dengan anggaran yang berbasis kinerja, hanya dengar sepintas lalu saja. Apalagi yang menanganai anggaran kan bagian keuangan sehingga kami dibagian lain ataupun instansi lain banyak yang tak tahu” (Hasil wawancara 2 September 2013).

Selanjutnya Ir. La Ode Zilfar Jafar, selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Setdakab Buton mengungkapkan hal yang sama:

“Anggaran yang berbasis kinerja untuk saat sekarang masih sulit untuk diterapkan karena banyak aparat yang tidak tahu dan butuh waktu yang cukup untuk sosialisasi, dan bagi yang tahu pura-pura tak tahu karena sistem ini menurut mereka akan membuatnya tidak bisa lagi untuk memainkan anggaran untuk kepentingan pribadi” (Hasil wawancara 2 September 2013).

Untuk item pernyataan bahwa penguku-

ran kinerja dilakukan untuk efisiensi anggaran dan mengurangi praktek KKN. 19 orang (27,9%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden mengetahui dan mengerti bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi KKN.

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan Wa Ode Hanasiah, S.Sos Selaku Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian di Setdakab Buton sebagai refleksi dari kesimpulan diatas:

"Tujuan utama dari adanya anggaran pemerintah yang didasarkan pada kinerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran karena selama ini kita tahu penyusunan anggaran lebih banyak untuk kepentingan kelompok tertentu bahkan kepentingan pribadi para pengambil kebijakan. Dengan adanya momentum reformasi dan otonomi daerah inilah kita perlu berpikir ulang untuk lebih efisien dalam anggaran kalau ini tidak dilakukan segera, mungkin saya yakin kita akan mengalami krisis yang susah untuk bangkit lagi" (Hasil wawancara 3 September 2013).

Kemudian Bapak Samsiar Anda selaku Kasubag Program Kerja pada bagian Administrasi Pembangunan di Setdakab Buton mengungkap hal yang agak bertolak belakang dengan ungkapan diatas,

"Saya kurang yakin kalau anggaran yang didasarkan pada kinerja ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi KKN, ini bukan berarti saya pesimis tapi kita punya banyak pengalaman kalau aparat kita paling pandai dalam mengelabui suatu aturan buat keuntungan pribadinya, pengetahuan saja tidak menjamin apalagi tak punya pengetahuan yang paling penting mental aparat perlu dibenahi dulu" (Hasil wawancara 3 September 2013).

Dari pernyataan tersebut terlihat adanya pemahaman yang berbeda antara para pejabat terhadap anggaran pemerintah yang didasarkan pada kinerja. Perbedaan pemahaman ini dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya pengalaman masa lalu dan pendidikan yang pernah diikuti seseorang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian tidak menginginkan pemberlakuan insentif anggaran berdasarkan kinerja. Anggapan ini didasarkan bahwa apabila

hal ini dilakukan banyak pejabat yang tidak siap karena mereka belum terbiasa dan banyak yang berpandangan negatif dengan ide ini. Pandangan Wa Ode Isra, SH Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan di Setdakab Buton setidaknya-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut sebagai berikut :

"Saya saja belum paham mengenai kinerja anggaran ini, dan saya yakin kebanyakan dari pegawai banyak yang tidak mengetahui, apa itu kinerja anggaran? Sepintas dengar memang bagus katanya bila diterapkan, tapi penerapannya kan tak segampang ngomongnya, apalagi hal ini sesuatu yang baru dimana aparat pemerintah tidak biasa melakukan suatu perubahan ditambah lagi bila berhubungan dengan kepentingannya" (Hasil wawancara 3 September 2013).

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan kebanyakan pejabat yang mempunyai eselon III dan IV saja yang cukup menerima dan memahami dengan baik ide-ide yang ditawarkan dalam kewirausahaan. Hal ini juga terlihat dari pernyataan M. Mahyuddin M, ST, M.Si Kasubag Prasarana Fisik Pemerintahan di Setdakab Buton yang penulis temui:

"Saya tak begitu ngerti dengan anggaran berbasis kinerja, teris terang saja saya belum pernah belajar hanya dengar-dengar kalau orang sedang sibuk memojokkan yang namanya kinerja, Saya beranggapan mungkin idenya bagus tapi menurut saya sangat susah untuk diterapkan bila pegawainya masih kayak gini, 'masih doyan maling' walau tak semua pegawai tapi umumnya, ya kayak gitu" (Hasil wawancara penulis 4 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan anggaran yang didasarkan pada kinerja mengandung prinsip akuntabilitas yang tinggi, terdapat 12 orang (17,7%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila anggaran yang didasarkan pada kinerja mengandung prinsip akuntabilitas yang tinggi.

Dari hasil observasi lapangan, banyaknya responden yang setuju dengan pernyataan tersebut seiring dengan berjalannya era otonomi daerah yang lebih mengedepankan, merespon dan mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Tetapi

banyak juga yang tidak mengetahui apalagi untuk menerapkannya, dikarenakan berbagai hal terutama yang menyangkut dengan komplikasi kepentingan.

Aspek Inovasi dan Kreatifitas

Inovasi dan kreatifitas merupakan salah satu hal yang utama dalam pemerintahan yang bergaya wirausaha. Inovasi dan kreatifitas dapat dijadikan barometer sebuah pemerintahan yang terus mencari format dan bentuk yang tepat dalam merespon perubahan dinamika yang begitu cepat terjadi dalam masyarakatnya. Untuk itulah pejabat pemerintah perlu melakukan inovasi diberbagai aspek pemerintahannya.

Berikut ini dalam tabel IV.7 akan disajikan data jawaban responden terhadap beberapa ide inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan yang bergaya wirausaha

Tabel IV.7. Aspek Inovasi dan Kreatifitas dalam *Entrepreneurial Government*

No	isi Pernyataan	Jawaban	Persentase (%)
1	Keuntungan dengan swasta dalam pelayanan publik seperti privatisasi, kemitraan, dll.	9	13,3
2	Perlu ada pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan (<i>sunset law</i>)	10	14,7
3	Adanya kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelayanan publik	11	16,1
4	Perlu ada kemitraan dalam setiap layanan dan program antara pemerintah	12	16,5
5	Perlu adanya pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan (<i>sunset law</i>) dalam sebuah peraturan	11	16,1
6	Pemerintah mengembangkan usaha menjadi keuntungan (profit) sebagai sumber pendapatan	9	13,3
Jumlah		48	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.7 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek inovasi dan kreatifitas untuk item pernyataan perlunya mengembangkan kemitraan dengan swasta dalam melakukan pelayanan publik seperti sistem kontrak maupun privatisasi, sebanyak 9 orang (13,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan ide pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam hal pelayanan publik dan hanya sebagian kecil yang setuju untuk dikembangkannya program kemitraan tersebut.

Berikut ini wawancara penulis dengan Ir.H. Mustamim Daly selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton:

"Jika pemerintah melakukan kemitraan dengan swasta dalam hal pelayanan publik takutnya nanti malah swasta yang berkembang dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa kan susah jadinya." (Hasil wawancara 5 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa masih terdapat kesalahan pandangan dalam melihat dan memahami ide kemitraan dan ketidakmengertian dari pejabat tentang kemitraan itu sesungguhnya. Selain itu mereka masih menganggap pihak swasta tidak bisa diajak bekerjasama dengan pemerintah karena swasta punya misi mencari keuntungan, berbeda dengan pemerintah. Dari hasil kuesioner dan wawancara dapat disimpulkan sebagian besar responden belum mengerti dan paham betul dengan konsep dan penerapan kemitraan ini.

Untuk item pernyataan perlunya pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan yang lebih dikenal dengan *sunset law*, hanya 10 orang (14,7%).

Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan adanya ide perlunya pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan (*sunset law*).

Pembatasan berlakunya sebuah aturan sebenarnya dimaksudkan agar peraturan-peraturan yang tidak lagi mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi dimasyarakat agar secepatnya dirubah atau ditinjau lagi keberadaannya, sehingga aturan tidak lagi menjadi penghambat kemajuan tetapi mendorong adanya perbaikan terutama sekali dalam hal pelayanan publik. Bagi pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah hal-hal yang demikian belum terbiasa untuk dilakukan. Perubahan baru dilakukan bila ada sebuah momentum atau desakan yang kuat dari masyarakat seperti adanya reformasi.

Pemerintah menganggap merubah aturan akan merusak sebuah sistem yang sudah mapan, dan setiap perubahan menelan biaya yang mahal baik sosial, ekonomi maupun biaya politiknya. Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan Bapak La Amiri, SH selaku Kepala

Bagian Hukum Setdakab Buton sebagai refleksi dari kesimpulan diatas:

"Susah bagi kita untuk mengganti aturan-aturan yang sudah ada walau terkadang aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi zaman, apalagi sampai melibatkan DPRD untuk merubah sebuah Perda tentu biayanya tidak sedikit, dan selanjutnya aturan yang sudah ada saja masih banyak yang belum diikuti, budaya taat pada aturan belum ada dalam masyarakat kita, Mungkin ini sebuah lompatan yang terlalu maju buat pemerintahan kita dan kita perlu lebih banyak belajar untuk dapat mencrapkannya" (Hasil wawancara penulis, 5 September 2013)

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa pejabat banyak yang enggan untuk mengadakan perubahan apalagi sampai merubah sebuah aturan, karena aturan-aturan yang ada dianggap sakral dan tidak perlu diubah kecuali ada tekanan yang besar dari masyarakat. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pejabat birokrasi masih banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya ide *sunset law* dengan baik, hanya dengar sepotong-sepotong.

Selanjutnya selain adanya *sunset law* dalam pemerintahan yang bergaya wirausaha juga dikembangkan inovasi tentang perlunya komisi peninjauan terhadap aturan-aturan yang berlaku (*review commissions*). Hal ini dimaksudkan untuk meneliti apakah aturan-aturan tersebut masih sesuai dan mampu merespon perubahan dinamika tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Ide perlunya setiap pemerintah daerah mempunyai rencana strategis dalam perencanaan pembangunannya menggantikan model Repelita gaya orde baru mulai dilaksanakan sejak berlakunya otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat yang berkepentingan didalamnya (*stakeholder*) yang selama ini tidak dilibatkan. Kebijakan selama ini selalu menggunakan pendekatan dari atas kebawah (*top down*). Untuk itu perlu dikembangkan strategi perencanaan pembangunan dengan pendekatan dari bawah keatas (*bottom up*) sehingga masyarakat benar-benar terlibat dan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersifat strategis.

Berikut ini wawancara penulis dengan beberapa pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton mengenai pandangannya mengenai perlunya pemerintah daerah/kota mempunyai rencana strategis dalam pengembangan daerah/kotanya.

"Saya sangat terlibat dalam pembuatan renstra ini karena saya bekerja di Bappeda, rencana strategis memang sangat bagus bila diterapkan karena langsung melibatkan masyarakat didalamnya, dan ini juga merupakan tuntutan dari pusat untuk dilaksanakan oleh setiap daerah. Cuma sayang sebagian masyarakat kita apatis dan terserah pada pemerintah daerah saja, Akibatnya ya sama saja renstra dibuat berdasarkan maunya mereka.

"Sejak otonomi ini banyak kali hal-hal yang baru, mulai dari DPRD yang sangat berkuasa, LPJ Bupati yang membuat kita pegawai tak tidur-tidur mengerjakannya, belum lagi katanya anggaran berbasis kinerja ditambah lagi dengan wajibnya renstra bagi kabupaten dan banyak lagi yang lain, itu semua membuat kita-kita dibawah ini jadi bingung, kita tak pernah tahu dan belajar itu semua, sosialisasinya pun setengah-setengah hati, jadi wajar banyak yang tak tahu menahu mengenai hal itu semua" (Hasil wawancara penulis, 5 September 2013).

Dari hasil wawancara serta observasi dilapangan, banyaknya responden yang setuju dengan ide renstra ini lebih dikarenakan memang adanya peraturan yang mewajibkannya. Kemudian sebagian responden yang lain masih banyak yang mengerti dengan renstra ini, mereka hanya ikut dengan berbagai penafsiran yang berbeda-beda, Kitapun banyak mendengar bahwa banyak daerah yang salah dalam menyusun renstra kabupaten/kotanya sebagai akibat dari ketidaktahuan mereka mengenai renstra itu sendiri.

Dari hasil observasi dilapangan, banyaknya responden yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut dikarenakan SOT baru yang telah disusun menyebabkan mereka pindah dari jabatan bahkan kehilangan jabatan yang selama ini mereka pegang. Akibatnya daerah perlu menyesuaikan organisasinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Konsekuensinya banyak organisasi pemda yang dihapus, digabung bahkan ada pembentukan organisasi baru. Berikut hasil wawancara

Kepala Bagian Keuangan Bapak LM. Davis, SE yang dapat menjelaskan sikapnya terhadap hal ini.

“SOT yang baru ini membuat pegawai bingung karena banyak yang kehilangan jabatan dan sumber penghasilan, lihatlah banyak pejabat yang nyogok untuk sebuah jabatan, SOT ini mungkin niatnya baik tapi nasib pegawai dan pertimbangan kemanusiaan perlu dipikirkan agar SOT ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kabupaten tanpa melupakan pegawai. Apa menjamin dengan SOT yang baru menyebabkan pemda lebih efisien dan responsive? kan tidak semudah itu, jadi perlu kematangan dan pengetahuan yang cukup sebelum hal ini dilakukan” (Hasil wawancara penulis, 6 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa pemerintah mengembangkan usaha mencari keuntungan (*profit oriented*) sebagai sumber pendapatan sebanyak 9 orang (13,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden tidak setuju bila pemerintah mengembangkan usaha mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan dan hanya sebagian kecil yang setuju untuk hal ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pejabat dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa disamakan dengan pihak swasta karena misinya berbeda dengan pemerintah, selanjutnya aparat pemerintah banyak yang tidak mempunyai kemampuan wirausaha dan terakhir banyak usaha-usaha yang dijalankan pemerintah rugi, kebocoran dimana-dimana, ditambah lagi efisiensi jauh dari yang diharapkan seperti perusahaan-perusahaan milik pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Hal ini terungkap dari beberapa hasil wawancara dengan M. Mahyuddin M, ST.,M.Si Kasubag Prasarana Fisik Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton berikut ini:

“Menurut saya memang sudah saatnya pemerintah berpikir untuk mencari sumber pendapatan baru, apalagi dengan otonomi daerah ini mau tidak mau suka tidak suka kalau mau jalan suatu pemerintah daerah ia harus punya sumber pendapatan yang besar.kita dibengkalis terbantu oleh dana perimbangan minyak jika ini tidak ada, kitapun sama tahu bengkalis menjadi hanyut

bila kita tidak punya pemikiran mencari sumber pendapatan alternatif selain dana perimbangan.” (Hasil wawancara penulis, 6 September 2013).

Begitulah adanya pemahaman dan pengertian yang beragam dari setiap responden mengenai setiap pernyataan yang ada dengan alasan yang berbeda pula, Setiap orang punya alasan tersendiri untuk menjawab setuju ataupun tidak setuju. Itulah gambaran umum jawaban responden terhadap aspek *profit oriented* yang dikembangkan pemerintah dengan alasannya setuju dan ketidak setujuan mereka.

Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah dalam Kewirausahaan.

Aspek Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Kewirausahaan

Tabel IV.8. Aspek Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kewirausahaan

No	Inti Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Penahaman saya terhadap konsep Entrepreneurial Government sudah baik	20	29,5
2	Penahaman dan pengetahuan konsep Entrepreneurial Government didapat dari seminar diklat, membaca buku atau bingkulugiah	23	33,8
3	Konsep Entrepreneurial Government dapat diaplikasikan kedalam kondisi di Indonesia	25	36,7
Jumlah		68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.8 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek pengetahuan dan sikap terhadap *kewirausahaan* untuk item pemahaman saya terhadap konsep *entrepreneurial government* sudah baik, sebanyak 20 orang (29,5%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden tidak memahami konsep *entrepreneurial government* dengan baik.

Berikut ini wawancara penulis dengan Yusniah, S.Sos selaku Kasubag Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Data pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang menggambarkan kesimpulan tersebut:

“Saya tak tahu apa itu Entrepreneurial Government, memang pernah dengar tapi ya tadi hanya sekilas-sekilas saja, kadang dengar di TV atau baca koran jadi saya tak paham betul mengenai itu apalagi saya cuma tamat SLTA.” Saya memang pernah dengar tentang

pemerintahan yang bergaya wirausaha dari Osborne katanya, tapi saya tak paham betul mengenai hal itu, waktu saya kuliah dulu tak ada belajar mengenai itu, apalagi hal inikan baru” (Hasil wawancara penulis, 9 September 2013).

Untuk item pernyataan bahwa pemahaman dan pengetahuan terhadap entrepreneurial government didapat dari membaca buku, seminar, diklat ataupun bangku kuliah, 23 orang (33,8%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden mengetahui ide Kewirausahaan dari membaca buku, ikut seminar, diklat ataupun dari bangku kuliah. Sebagian besar responden juga tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang Kewirausahaan dari itu semua sehingga wajar kalau mereka sebagian tidak mengerti.

Pandangan Bapak La Ode Karman, SE, MM Kasubag Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton setidaknya tidak merefleksikan persepsi tersebut.

“Saya rasa konsep Entrepreneurial Government ini bisa diterapkan walaupun saya sebenarnya tak paham betul tapi saya dengar-dengar konsep ini akan menjadikan birokrasi yang efisien dan terlalu birokratis. Kenapa tidak tentu bisa diterapkan dalam birokrasi kita, Cuma masalahnya apakah para birokrat dan masyarakat kita sudah siap apa belum? Karena akan ada perubahan cara berpikir dan bagaimana kita melihat birokrasi ini” (Hasil wawancara penulis, 9 September 2013).

Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Samirudin selaku Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan di Setdakab:

“Kita dalam penerapannya memang perlu modifikasi sesuai konteks yang kita hadapi, tentu saja berbeda antara kita dengan negara-negara barat, aspek budaya juga menjadi bahan pertimbangan penting bila kita hendak menerapkan konsep tersebut dan banyak aspek lainnya, tapi yang jelas prinsip-prinsipnya tidak boleh ditinggalkan” (Hasil wawancara penulis, 9 September 2013).

Aspek Kompetensi

Tabel IV.9. Aspek Kompetensi

No	Inti Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pemahaman saya terhadap konsep Entrepreneurial Government sudah baik	20	29,4
2	Pemahaman dan pengetahuan konsep Entrepreneurial Government didapat dari seminar, diklat, membaca buku atau bangku kuliah	23	33,8
3	Konsep Entrepreneurial Government dapat diaplikasikan kedalam birokrasi di Indonesia	25	36,7
Jumlah		68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.9 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek Kecakapan, keterampilan dan pengetahuan menjadi pertimbangan penting dalam memangku sebuah jabatan, sebanyak 13 orang (19,1%).

Berikut ini wawancara penulis Bapak Syafaruddin, SKM., M.Kes, selaku Kasubag Bantuan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang menggambarkan kesimpulan tersebut:

“Menurut saya sudah sewajarnya seorang pejabat harus cakap, terampil dan berpengetahuan tapi masalahnya kan bukan, siapa yang kenal dan punya hubungan dengan orang yang berwenang baru bisa duduk di sebuah jabatan, ya KKN lah atau perkoncoan, kalau kita tak ada hubungan susahlah mau dapat jabatan kecuali nasib baik. Untuk saat sekarang pertimbangannya bukan kompetensi tapi kedekatan dengan penguasa” (Hasil wawancara penulis, 9 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar pejabat pemda setuju adanya kompetensi dalam memegang sebuah jabatan, tetapi sistem perkoncoan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Akibatnya tidak lagi memperhatikan kompetensi, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam memangku jabatan.

Untuk item pernyataan bahwa kemampuan bekerjasama harus dimiliki oleh seorang petugas pelayanan, 16 orang (23,5%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden memahami dengan baik bahwa kemampuan bekerjasama untuk seorang petugas pelayanan sangat dibutuhkan. Sebuah pelayanan publik tidak hanya terkait dalam satu bagian atau unit saja bahkan lintas bagian, kantor dan lintas dinas.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa diperlukan inovasi

dan kreatifitas dari sekedar loyal pada prosedur atau aturan-aturan yang kaku, menunjukkan 19 orang (27,9%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian besar setuju bila diperlukan sebuah inovasi dan kreatifitas dari seorang aparat daripada hanya sekedar loyal dan taat pada aturan yang kaku. Hal ini dimungkinkan karena dalam birokrasi ada yang namanya kewenangan diskresi. Kebanyakan dari pegawai tidak berani untuk mengadakan sebuah inovasi atau bentuk kreatifitas karena hal tersebut dianggap melanggar aturan. Pandangan Hardianti, SE Kasubag. Pembedaharaan di Setdakab Buton setidaknya-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

“Pegawai yang kreatif dan inovatif sangat jarang kita jumpai dan mereka tidak terbiasa dengan hal itu, mereka hanya terbiasa dengan taat pada aturan, juklak ataupun juknis selain itu dianggap melanggar aturan dan mendapat sanksi. Padahal sebuah inovasi diperlukan agar mencari hal-hal yang terbaik dan paling efisien dalam pemerintahan ini. Kita sebenarnya terus mendorong untuk tumbuhnya inovasi dan kreatifitas pegawai, dengan syarat tidak untuk kepentingan pribadi. Kewenangan untuk diskresi saya berikan pada bawahan saya selama hal itu tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan, karena saya yakin kekakuan pada aturan akan menyebabkan kita lambat dalam merespon kondisi lapangan yang selalu berubah-ubah”. (Hasil wawancara penulis, 10 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan Mempunyai kemampuan mengambil keputusan dan mempunyai kewenangan dalam diskresi power, terdapat 20 orang (29,5%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila mereka mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dan mempunyai kemampuan *diskresi power*. Jabatan yang mereka pegang tentu saja ada kewenangan yang terkandung di dalamnya dan kita selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pejabat eselon III di Setdakab:

“Dalam sebuah jabatan jelas sudah terkandung kewenangan didalamnya ada tugas, kewajiban yang harus kita selesaikan

sebagai rasa tanggungjawab dan kita selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan-keputusan sesuai dengan jabatan yang kita pegang”.

Aspek Sosialisasi Dari Prinsip Kewirausahaan

Tabel IV.10. Aspek Sosialisasi Prinsip Kewirausahaan

No	Item Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering mengikuti seminar, workshop dan simposium yang berhubungan dengan <i>entrepreneurial government</i>	21	30,8
2	Diklat struktural yang saya ikuti telah <i>menyajikan konsep entrepreneurial government</i>	23	33,9
3	Pemerintah daerah telah mengadopsi konsep <i>entrepreneurial government</i> ini dalam sebuah kegiatan sosialisasi seperti seminar	24	35,3
Jumlah		68	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.10 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek sosialisasi dari prinsip kewirausahaan untuk item pernyataan Sering mengikuti seminar, workshop dan simposium yang berhubungan dengan *entrepreneurial government* 21 orang (30,8%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden belum pernah mengikuti acara-acara yang membahas konsep-konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha. Dapat disimpulkan kalau sebagian besar pejabat pemda banyak yang tidak mengetahui dan memahami ide dan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha.

Berikut ini wawancara penulis dengan Bapak LM. Rahimin Baharuddin, SP Selaku Kasubag. Sumber Daya Alam pada Bagian Perencanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton:

“Kami yang duduk di eselon IV ini jarang ikut-ikutan seminar atau lokakarya apalagi acara-acaranya yang di Jakarta, itu hanya buat eselon II atau sekali-kali eselon III, jadi terus terang saja kami banyak tak tahu tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi, palingan hanya sekedar tahu dikit-dikit saja. (Hasil wawancara penulis, 10 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa untuk pejabat rendah jarang sekali diberi kesempatan untuk mengikuti seminar ataupun lokakarya sehingga sudah sewajarnya kalau pengetahu-

annya tidak bertambah apalagi kalau tidak ada kemauan untuk mengembangkan diri sendiri.

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa Diklat Struktural yang diikuti oleh pejabat pemda mulai dari Adum sampai Spati mengajarkan pelajaran yang berbeda. Konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha diajarkan pada diklat penjenjangan spama. Banyaknya responden yang tidak pernah mendapat pelajaran tentang hal ini dikarenakan sebagian besar responden duduk pada eselon IV dan formasi jabatan yang paling banyak dipemda adalah untuk eselon IV. Inilah kondisi riil yang dihadapi oleh umumnya pegawai, ditambah lagi tidak semua pegawai selalu mempunyai komitmen untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Tidak ada budaya belajar dalam birokrasi kita terutama bagi pegawainya.

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah daerah telah mengenalkan konsep entrepreneurial government dalam sebuah kegiatan sosialisasi seperti seminar menunjukkan 24 orang (35,3%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengadakan sosialisasi terhadap konsep kewirausahaan ini. Pandangan Wa Ode Mirawati, SE selaku Kusubag. Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sedikit-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

"Seingat saya tak pernah pemerintah daerah mengadakan sosialisasi terhadap konsep ini, kalau untuk renstra daerah pemerintah telah mengadakan sosialisasi, saya rasa konsep itu didapat dibangku perkuliahan atau diseminar maupun kita belajar otodidak dengan membaca buku sendiri" (4 Agsutus 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketidaktahuan responden terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha lebih dikarenakan mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang itu terutama sekali pada saat mereka kuliah. Pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang akan membentuk pengetahuannya. Selanjutnya pengetahuan seseorang akan menuntun tindakan maupun perbuatannya. Penerimaan dan penolakan terhadap konsep-konsep baru selalu mendapat penolakan

apalagi bila tidak mempunyai pengetahuan yang luas terhadap hal baru tersebut. Itulah yang terjadi pada pejabat pemerintah daerah Kabupaten Buton pada umumnya dimana pengetahuan mereka terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha sangat minim dikarenakan sosialisasi dari konsep ini yang sangat kurang.

Aspek Budaya

Budaya birokrasi kita sangat dipengaruhi oleh budaya paternalistik. Banyak hasil penelitian yang menyatakan hal ini. Mulai dari sistem rekrutmen, penempatan seseorang dalam jabatan sampai hal yang bersifat penghormatan dan ketergantungan yang tinggi dengan atasan. Pola-pola hubungan yang terbentuk tidak mendorong munculnya kreatifitas dan inovasi. Etos kerja dan motivasi pegawai juga tidak terbentuk dengan baik karena sistem insentif yang dibangun tidak mendorong kearah sana. Aspek budaya sangat mempengaruhi pola pikir dan perubahan yang akan dilakukan oleh seseorang. Budaya yang tidak mendukung adanya suatu perubahan sangat sulit sekali untuk menerima sesuatu hal yang baru, untuk itu perlu dikembangkan budaya yang kondusif untuk berkembangnya hal yang baru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11. Aspek Budaya

No	Sal Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sikap paternalistik dan hirarki yang kaku masih mewarnai hubungan atasan bawahan dalam organisasi sendiri	15	22,1
2	Pemda telah mendorong dan mengembangkan (suasana kerja) kewirausahaan dalam budaya kerja	17	25
3	Sistem insentif yang dikembangkan oleh pemda mendorong motivasi dan kinerja pegawai untuk berprestasi	17	25
4	Bentuk dan cara komunikasi yang dikembangkan pemda memuat dan ramah.	16	23,9
	Jumlah	65	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.11 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek budaya dalam menjelaskan pembentukan pandangan dan pengetahuan responden terhadap prinsip entrepreneurial government untuk item pernyataan sikap paternalistik dan hirarki yang kaku masih mewarnai hubungan atasan bawahan dalam organisasi pemda 15 orang (22,1%). Dengan demikian dapat disimpulkan kalau sebagian besar pejabat pemda

banyak yang setuju bila dalam organisasi pemda budaya paternalistik masih mengakar sangat kuat.

Pemerintahan yang bergaya wirausaha tidak memberikan tempat pada budaya paternalistik, hirarki yang kaku dan terpaku pada aturan-aturan yang permanen. Keluwesan pada aturan, inovasi, kreatifitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas selalu menjadi pendorong untuk terciptanya pemerintahan yang bergaya wirausaha selama tidak bertentangan dengan misi yang diemban organisasi.

Berikut ini wawancara penulis Bapak Marjani Wali, S.Sos., M.Msip selaku Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sebagai berikut :

“Salah satu masalah penting yang kita hadapi dalam membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bergaya wirausaha adalah adanya budaya paternalistik yang mengakar kuat dalam pemerintahan saat ini. Hubungan atasan bawahan yang kaku selalu mematikan inovasi dan kreatifitas. Yang terjadi adalah ketakutan dan ketergantungan pegawai yang besar pada atasan, pegawai tidak berani mengambil keputusan sebelum meminta petunjuk dengan atasan”. (2 September 2013).

Untuk item pernyataan bahwa pemerintah daerah telah mendorong dan mengembangkan jiwa serta spirit kewirausahaan dalam budaya kerja, 17 orang (25%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah tidak mengembangkan dan mendorong konsep kewirausahaan dalam budaya kerja. Berikut hasil wawancara penulis dengan Jafar, S.AP selaku Kasubag. Pengumpulan Data Layanan Informasi dan Publikasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ;

“Seingat saya belum ada sebuah usaha dari pemerintah daerah untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dilingkungan organisasi pemda” Kita bisa contohkan sistem insentif bagi pegawai yang ada selama ini tidak mencerminkan spirit kewirausahaan karena insentif yang diberikan tidak didasarkan pada kinerja seseorang”. (4 September 2013).

Terlihat jelas dari dari hasil wawancara bahwa pemerintah daerah belum mengembangkan semangat kewirausahaan dalam budaya kerja birokrasinya. Salah satu strategi

dalam mengembangkan kewirausahaan adalah strategi budaya. Strategi ini dilakukan dengan mengubah kebiasaan, menyentuh perasaan dan mengubah pikiran atau pandangan seseorang terhadap suatu hal.

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan sistem insentif yang mendorong motivasi dan etos kerja pegawai menunjukkan 17 orang (25%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden berpendapat bahwa pemerintah daerah belum mengembangkan sistem insentif yang mendorong motivasi dan etos kerja pegawai. Pandangan Zuhri Maryam Zain. SAP Kasubag pada Bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton setidaknya-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

“Sistem insentif belum dikembangkan oleh pemerintah daerah, pegawai yang banyak proyek bisalah dapat rezeki lebih sedangkan yang pegawai yang tak ada kegiatan tak dapat apa-apalah. Uang insentif tambahan penghasilan buat pegawai pembagiannya sama rata saja. Tidak ada pemikiran untuk mengubah kebiasaan yang sudah mengakar dalam organisasi pemerintah daerah ” (5 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa pemerintah daerah mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif, terdapat 19 orang (27,9%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa pemerintah belum mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif. Berikut hasil wawancara dengan Ramli Adia, S.Kom Kasubag. Pada Bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton,

“Kita sama atasan sangat segan dan kurang komunikasi, apalagi untuk menegur atasan adalah sangat sulit, Kebanyakan atasan merasa orang yang paling pintar dan tanpa koreksi. Secara umum kayak gitu adanya. Pemerintah daerah belum ada usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk mengembangkan bentuk komunikasi yang terbuka pada semua pegawai maupun antara atasan dan bawahan, budaya itu belum terbangun” (5 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita

simpulkan bahwa pembentukan budaya komunikasi yang dua arah dan terbuka belum dikembangkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan budaya merupakan suatu yang sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Budaya yang berkembang dalam sebuah lingkungan akan menentukan cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Budaya juga akan memberikan penilaian tentang penerimaan ataupun penolakan terhadap sebuah ide atau konsep yang akan dikembangkan ke dalam sebuah organisasi, seperti pengembangan konsep dan nilai-nilai pemerintahan yang bergaya wirausaha dalam organisasi pemda.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pandangan dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep kewirausahaan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini, masih sangat rendah. Kendati pandangan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Buton tidak mempresentasikan pandangan pejabat birokrasi, temuan dari penelitian ini setidaknya memberikan gambaran mengenai rendahnya pengetahuan pejabat birokrasi terhadap ide, konsep maupun paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan modern.

Dilihat dari semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini, pemahaman dan pengetahuan pejabat pemda Kabupaten Buton terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (*entrepreneurial government*) masih sangat rendah, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip *customer oriented* (pemerintah yang berorientasi pada masyarakat). Adanya penolakan terhadap ide *citizen carter* (piagam warganegara) dan konsep *customer choice* (pilihan pelanggan) dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya pejabat Pemda Kabupaten Buton masih menginginkan pemerintah yang mengambil alih semua kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan publik dan tidak adanya kepercayaan pada pihak swasta dan masyarakat dalam mengelolanya. Selanjutnya untuk konsep efisiensi anggaran pemerintah dengan adanya anggaran yang didasarkan pada kinerja hanya sebagian pejabat yang memahaminya, dan

sebagian lagi tidak memahaminya. Terhadap sistem insentif dalam anggaran pemerintah sebagian besar pejabat tidak memahaminya.

Beberapa pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam pemerintahan yang wirausaha seperti pola kemitraan dengan swasta, ide *sunset law* (pembatasan berlakunya sebuah peraturan), adanya komisi peninjau peraturan (*review commissions*) tidak dipahami secara mendalam oleh pejabat pemerintah kabupaten Bengkalis. Kemudian konsep *renstra* dalam kebijakan pemerintah sebagian besar pejabat memahaminya dengan baik. Untuk ide penyusunan SOT (*struktur organisasi dan tatalaksana*) dalam organisasi pemda banyak terjadi penolakan oleh mereka yang diragukan dengan penataan tersebut, dan diterima oleh mereka yang diuntungkan.

Dilihat dari aspek budaya birokrasi yang sangat kental dengan budaya paternalistik dan perkoncoan dapat menjelaskan begitu sulitnya konsep ini untuk dikembangkan. Hubungan antara atasan dan bawahan yang kaku, komunikasi searah yang tidak sehat, sistem insentif yang tidak menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pejabat menyebabkan rasa malas dari setiap pejabat untuk mengembangkan pengetahuannya. Dalam laporan ini ditemukan bahwa yang mengikuti seminar-seminar, lokakarya dan diklat-diklat fungsional hanya untuk pejabat eselon III yang dekat dengan kekuasaan dan untuk pejabat eselon II sedangkan pejabat eselon IV jarang sekali mengikutinya.

Saran

Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, bisa disimpulkan masalah yang dihadapi oleh pejabat birokrasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan mereka dalam memahami konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (*entrepreneurial government*). Upaya peningkatan pengetahuan pejabat adalah sangat kompleks dan memiliki dimensi yang amat banyak. Upaya ini menuntut intervensi pemerintah daerah yang besar dalam semua dimensi permasalahan secara holistik. Adapun upaya yang dapat dilakukan dan perlu mendapat perhatian serius yaitu:

Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk mengirimkan pejabat-

pejabatnya sebanyak mungkin pada pendidikan formal khususnya yang mengajarkan tentang pemerintahan yang bergaya wirausaha ataupun yang mengajarkan tentang konsep-konsep baru penyelenggaraan pemerintahan modren saat ini.

Perlunya Pemda Kabupaten Buton untuk mengadakan acara sosialisasi kepada seluruh pejabat tentang pengetahuan yang berkenaan dengan kewirausahaan sektor publik, sehingga diperoleh pandangan dan pemahaman yang sama diantara pejabat dan memudahkan untuk melakukan tindakan aksi penerapan konsep-konsep ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryson John M. 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Caiden, Gerald.E, 1991, *Administrative Reform Comes of Age*, Newyork, N.Y,de Gruyter
- Dwiyanto, Agus, 1996, *Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia*, Makalah Tada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
- 2001, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta.
- Edralm, J.S, 1997, *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*, *Regional Development Studies*, Vol.3
- Ferlie, Ewan, Ashburner, Lynn, Fitzgerald, Louise dan Pettigrew, Andrew, 1996, *The New Public Management in Action*, Oxford University Press, New York,
- Gafar Affan, (2000), *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Glezer, Barney G. Anselm L. Strauss, 1976, *The Discovery of Grounded Theory: Strategy for Qualitative Research*, Chicago, Aldine Publishing Company.
- Goodman, Jon, 1993, *Kewirausahaan Dalam Perusahaan*, Manajemen, No.89.
- Hariandja, Denny.B.C, 1999, *Birokrasi Nan Pongah. Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hisrich, Robert D, (Ed) 1986, *Entrepreneurship Intrapreneurship and Ventura Capital*, Mass-Lexington Books, Lexington
- Hughes, Edgar, Owen, 1994, *Public Management And Administration*, St. Martin's, United States of America.
- Kao Jj, 1989, *Entrepreneurship Creativity and Organization*, Prentise-Hall, New Jersey.
- Keban, Yeremias T., 2000, *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999, *Disain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi*, Man dan Usaha Ind (17).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI Press, Jakarta.
- Mochtar.M. 2000, *Pengantar Metode Penelitian*, IIP, Jakarta.
- Moenic.H.A.S. 2000, *Manajemen Pelayanan Unum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mutis Thoby, 1995, *Kewirausahaan Yang Berproses*, Grassindo, Jakarta
- Nasution.S. 1988, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Noeng Muhadjir, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologistik Realisme Methaphisik*, PT.Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nurjani, 1997, *Persepsi Pustakawan Terhadap Profesi Pustakawan*, Tesis Pasca Sarjana UI, Jakarta
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995, *Mewirausahakan Birokrasi : mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2 (terjemahan)*, PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha (terjemahan)*, PPM, Jakarta.
- Rakhmad, Jalaluddin, 1991, *Psikologi Komunikasi*, CV.Rajawali, Jakarta
- Rasyid, Ryaas, Muhammad, 2001, *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*, PUSKAP MIPI, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, Muhammad, 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rush, Michael dan Althoff Phillip, 2000,